

**KAJIAN ATAS PENSERTIPIKATAN TANAH *DRUWE DESA*
DI DESA PEKRAMAN DENCARIK
KABUPATEN BULELENG**

INTISARI

Putu Ari Sujaneke¹, Tody Sasmitha Jiwa Utama²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan sikap masyarakat hukum adat di Bali atas pensertipikatan tanah *druwe desa* dan penyelesaian terhadap tanah *druwe desa* yang telah disertipikatan selain itu penulisan ini dapat memberikan pemahaman untuk masyarakat, pemerintah desa *pekraman*, pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar terjaganya keeksistensian tanah adat di Bali.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Jenis dan sumber data yang diperoleh merupakan hasil dari penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan subjek penelitian yang. Selanjutnya akan memperoleh data sekunder dari penelitian kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang sesuai dengan topik penulisan hukum ini. Analisis hasil menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan secara deskriptif dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode logika induktif.

Hasil penelitian penulis memperoleh data bahwa tanah *druwe desa* sebagai tanah yang bersifat komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di Desa *Pekraman* Dencarik sebagai wilayah milik desa adat dan *krama* hanya diberikan hak penguasaan secara adat bukan menjadi milik individu yang menimbulkan eksklusifisme yang dapat menghilangkan sifat *ayahan* dari penguasaan tanah tersebut kepada desa adat sebagai pemilik. Dari penelitian empiris diperoleh bahwa masyarakat atau *krama* masih dalam keadaan dilema untuk melakukan pensertipikatan atas tanah tersebut, karena keuntungan dari pensertipikatan adalah nilai ekonomis suatu tanah tersebut tapi akan menimbulkan konflik internal masyarakat karena wilayah adat sudah tidak terjamin keutuhannya. Penyelesaian dari konflik seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi atau menempuh jalur hukum apabila tanah tersebut bermasalah dengan pihak ketiga.

Kata kunci: Pensertipikatan tanah adat, Individualisasi, Druwe Desa, Eksklusifisme

¹ Pogung Baru Blok D No. 3, Mlati, Sleman, Yogyakarta, Email: sujanekaari@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

**STUDIES OVER INDIGENOUS *DRUWE DESA* LAND CERTIFICATION
IN DENCARIK VILLAGE
BULELENG REGENCY**

ABSTRACT

Putu Ari Sujaneke¹, Tody Sasmitha Jiwa Utama²

This research aims to know the impact of customary law society's attitudes and in Bali over the certificate of the *druwe desa* land and *druwe desa* to land settlement that has the certification in addition to this writing can give understanding to the community, the Government of the village of *pekraman*, local governments and the Central Government in order to safeguard the existence of indigenous land in Bali.

This research is empirical legal research with normative and descriptive approaches. Types and sources of data obtained as the result of fieldwork to obtain primary data is done with the interview with the subject of the research. Next up will be the secondary data obtained from research libraries through regulation of legislation and books that match the topics of legal writing. Analysis of the results using the method of qualitative analysis to answer the problems in descriptive conclusion and withdrawal method using inductive logic.

The results of the research the author obtained the data that the land *druwe desa* as a communal are the nature of land owned by customary law community in the village of *Pekraman* Dencarik area belongs to village customs and manners are only given in customary rights not belong to the individual who raises exclusivisme that can eliminate the *ayahan* nature of the land ownership to indigenous villages as the owner. From empirical research retrieved that society or manners are still in a State of dilemma to do the certification on the ground that, because of the advantages of the certification is the value of the land is an economical but will give rise to a conflict of the customs territory of the community because internal has not been ensured unity. Settlement of conflicts such as this can be done in two ways is mediation or legal lines traverse the land in trouble with the third side.

Keyword: The Certification of Indigenous Land, Individualization, *Druwe Desa*, Exclusivisme

¹ Pogung baru street Blok D No. 4, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Email: sujanekaari@gmail.com

² lecturer, faculty of Law, Gadjah Mada University